



---

**DETERMINAN JUMLAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA:  
ANALISIS DATA PANEL 6 PROVINSI**

***Determinants of the Number of Indonesian Migrant Workers:  
A Panel Data Analysis of 6 Provinces***

**Ellen Angelina Nainggolan<sup>1</sup>, Jusmer Sihotang<sup>2</sup>, Martin Luter Purba<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

e-mail: [ellen.angelina@student.uhn.ac.id](mailto:ellen.angelina@student.uhn.ac.id)

**Article History:** Received: August 16, 2025; Revised: August 25, 2025; Accepted: August 28, 2025

---

**ABSTRAK**

Tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya UMP, dan rendahnya rata-rata lama sekolah merupakan faktor yang dapat mendorong penduduk untuk melakukan migrasi internasional dalam rangka memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Variabel yang digunakan meliputi tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, dan rata-rata lama sekolah. Penelitian menerapkan metode analisis data panel dengan menggabungkan data dari enam provinsi di Indonesia dan data tahunan periode 2010–2023. Analisis data dilaksanakan memakai software Eviews 12 SV, dengan model terbaik yang diperoleh adalah Fixed Effect Model. Hasil estimasi secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah PMI, upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan, sementara rata-rata lama sekolah dengan hasil pengaruh negatif dan tidak signifikan. Dalam hal ini pemerintah diperlukan memperkuat kebijakan ketenagakerjaan melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja untuk menekan pengangguran, memastikan kenaikan UMP diimbangi dengan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, upaya peningkatan pendidikan hingga minimal SMA perlu terus digalakkan agar tenaga kerja memiliki peluang yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Rata-rata Lama Sekolah

---

**ABSTRACT**

*The high level of open unemployment, the low provincial minimum wage (UMP), and the low average years of schooling are factors that may encourage people to engage in international migration in pursuit of a better quality of life. The purpose of this study is to analyze the factors that influence the number of Indonesian Migrant Workers (PMI). The variables used include the open unemployment rate, provincial minimum wage, and average years of schooling. This research applies panel data analysis by combining data from six provinces in Indonesia with annual data covering the period 2010–2023. The data analysis was conducted using Eviews 12 SV software, with the best model obtained being the Fixed Effect Model. The partial estimation results indicate that the open unemployment rate has a positive but insignificant effect on the number of PMI, the provincial minimum wage has a positive and significant effect, while the average years of schooling has a negative but insignificant effect. In this context, the government needs to strengthen labor policies through training programs and skills development to reduce*

---



*unemployment, while ensuring that increases in the minimum wage are accompanied by inflation control so that people's purchasing power remains stable. Furthermore, efforts to improve education to at least the senior high school level must continue to be encouraged in order to provide workers with broader opportunities.*

**Keywords:** *Migrant Workers, Unemployment Rate, Provincial Minimum Wage, Average Years of Schooling.*

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dan jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan nasional. Apabila peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan pemerataan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, maka akan memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya pengangguran dan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, perencanaan kependudukan menjadi hal penting agar pertumbuhan tersebut tidak menghambat pembangunan (Hutasoit, 2017).

Salah satu dampak dari pertambahan jumlah penduduk adalah meningkatnya jumlah angkatan kerja. Ketika penciptaan lapangan kerja di dalam negeri tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan pencari kerja, maka tingkat pengangguran terbuka pun ikut meningkat. Selain itu, rendahnya penyerapan tenaga kerja dalam negeri serta adanya perbedaan tingkat upah antar negara mendorong penduduk untuk mencari peluang kerja di luar negeri (Reni et al., 2016).

Dalam penelitian ini dengan cara membandingkan jumlah pekerja migran Indonesia dengan jumlah penduduk seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Nisa, 2019) Digunakan data dari 34 provinsi, karena meskipun Indonesia telah memiliki 38 provinsi pada tahun 2023, data statistik yang tersedia secara lengkap hanya mencakup 34 provinsi. Empat provinsi hasil pemekaran belum memiliki data resmi yang dapat dianalisis.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2023 (Jiwa)**

Provinsi	Jumlah Penduduk <sup>1</sup>	Pekerja Migran Indonesia <sup>2</sup>	Rasio Jumlah PMI
Lampung	4.496.600	22.828	5.08
Jawa Barat	49.306.800	56.663	1.15
Jawa Tengah	37.180.400	64.566	1.74
Jawa Timur	41.230.000	78.594	1.91
Bali	4.374.300	9.371	2.14
Nusa Tenggara Barat	5.474.000	34.501	6.30

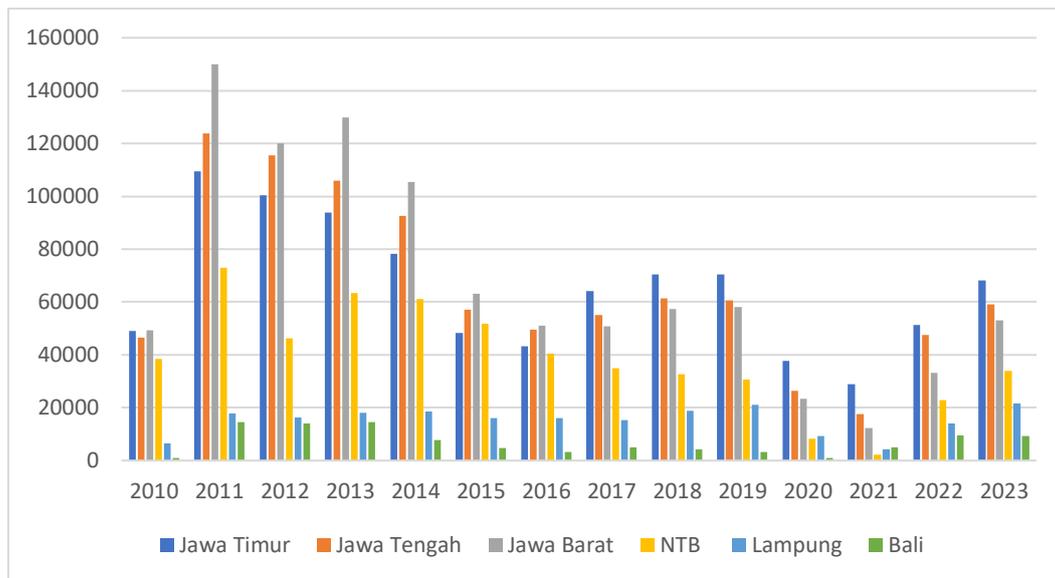
Sumber: <sup>1</sup>) Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

<sup>2</sup>) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023

\* Data diolah Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1, data tersebut dapat dilihat secara visual pada Gambar 1. Jumlah PMI dari enam provinsi menunjukkan pola fluktuatif sepanjang periode 2010 hingga 2023. Pada periode 2014 terjadi penurunan PMI dilanjut dengan

tahun 2015-2016, terjadi penurunan yang drastis jumlah PMI di seluruh provinsi. Hal ini terjadi akibat diberlakukannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan PMI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2015 dan dikeluarkan karena tingginya permasalahan yang menimpa PMI serta lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara tujuan (jdih.bnp2tki.go.id dalam Prativi, 2019).



**Grafik 1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia pada 6 Provinsi Tahun 2010 - 2023 (Jiwa)**

Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, data diolah Tahun 2025

Jumlah PMI menurun di seluruh provinsi tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Meskipun sempat mengalami penurunan pada 2020 dan 2021, jumlah PMI kembali meningkat setelah pandemi mereda. Pada tahun 2022, jumlah PMI mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena peluang kerja mulai tersedia kembali.

Keterbatasan lapangan pekerjaan di negara asal mendorong individu untuk mencari peluang bekerja di luar negeri. Tingginya pengangguran menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai alternatif bagi mereka yang kesulitan memperoleh pekerjaan (Kemnaker, 2025). Selain pengangguran, faktor lain yang memengaruhi keputusan seseorang untuk bermigrasi adalah perbedaan tingkat upah antar negara yaitu negara asal dan tujuan. Upah yang lebih besar di negara tujuan memberikan insentif lebih besar bagi pekerja untuk mencari peluang di luar negeri. Hal ini menjadi alasan kuat, selain terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri, sehingga PMI banyak memilih untuk bekerja di luar negeri demi memperoleh penghasilan yang lebih baik (Massey et al., 1993; Achsin & Rosalinda, 2021).

Pada tahun 2023, jenis pekerjaan yang didominasi oleh PMI berdasarkan 6 provinsi mencakup tiga sektor utama, yaitu pembantu rumah tangga (*house maid*), pengasuh (*caregiver*), dan pekerja perkebunan. Pekerjaan-pekerjaan ini

umumnya tidak mensyaratkan pendidikan formal yang tinggi, melainkan lebih menekankan pada keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang menetapkan bahwa syarat utama bagi seorang PMI adalah memiliki kompetensi kerja, bukan tingkat pendidikan formal.

Berdasarkan data pada tahun 2023, proporsi pendidikan PMI pada 6 provinsi menunjukkan bahwa mayoritas mereka memiliki tingkat pendidikan rendah. Sebanyak 362 orang (0,12%) tidak bersekolah, berpendidikan SD 30.429 orang (10,24%), SMP 54.664 orang (18,40%), SMA sebanyak 78.844 orang (26,54%). Pendidikan tinggi mencakup Diploma 3.354 (1,13%), Sarjana 2.123 (0,71%), dan Pascasarjana hanya 35 orang (0,01%). Sementara 96.712 orang (32,55%) tidak diketahui jenjang pendidikannya. Persentase ini menunjukkan bahwa mayoritas PMI Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, sesuai dengan proporsi pendidikan yang ada di provinsi-provinsi pengirim PMI. Hal ini menjelaskan mengapa banyak PMI yang memilih untuk bekerja di luar negeri, di mana mereka dapat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi meskipun tidak membutuhkan pendidikan tinggi, namun dengan keterampilan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri.

Menurut (Mangara et al., 2024) dan (Oli, 2023) tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap migrasi internasional. Hal ini sesuai dengan teori Everet S. Lee dalam (Rahmadana, 2020) yang dimana faktor rintangan antara berupaya hambatan seperti biaya perpindahan, kondisi geografis, atau ketersediaan sarana transportasi. Menurut (Rini et al., 2023) dan (Farraas, 2024) upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan yang dimana upah minimum provinsi meningkat maka jumlah pekerja migran juga meningkat, sesuai dengan teori Makro Ekonomi Neoklasik dikarenakan migrasi terjadi perbedaan upah antarnegara sehingga pekerja dari negara berupah rendah cenderung pindah ke negara berupah tinggi.

Pada penelitian ini menggunakan data panel yang dimana menggunakan data cross section 6 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Lampung, Bali) dengan periode 2010-2023. Hal ini dapat menjadikan pembeda dengan penelitian lainnya pada fokus cross section dan period. Dalam hal ini mendapatkan pengaruh dari tingkat pengangguran terbuka, UMP, dan rata-rata lama sekolah terhadap jumlah pekerja migran.

## **BAHAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data *Cross section* dan data *time series* dalam analisis kuantitatif. Data lintas wilayah mencakup enam provinsi di Indonesia, sedangkan data runtut waktu meliputi periode tahun 2010 hingga 2023. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai instansi dan referensi, seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, serta sejumlah jurnal, buku, dan situs web yang relevan dengan topik penelitian ini.

Penelitian ini menerapkan metode *non-probability* dengan pemilihan unit analisis berdasarkan kriteria jumlah penduduk. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sampel berdasarkan rasio terbesar jumlah PMI terhadap jumlah penduduk dengan pengambilan keputusan pada 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Lampung, dan Bali. Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Dimana: *Y* adalah Jumlah Pekerja Migran Indonesia (Jiwa),  $\beta_0$  merupakan intersep,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  merupakan koefisien masing-masing variabel independen,  $X_1$  adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (%),  $X_2$  adalah Upah Minimum Provinsi (Rupiah),  $X_3$  adalah Rata-rata Lama Sekolah (Tahun),  $\epsilon_{it}$  adalah error term, *t* adalah Tahun ke-*t*, *i* adalah unit cross section ke-*i*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model Estimasi Data Panel

Menurut (Basuki, 2021), metode estimasi model regresi dengan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

**Tabel 2. Hasil pengujian model & asumsi klasik**

Pengujian	Hasil
Uji Chow	• Prob. Cross Section F 0,0000
Uji Hausman	• Prob. Cross Section random 0,0000
Uji Multikolinearitas	• X1 dan X2 -0,3010155 • X1 dan X3 -0,227064 • X2 dan X3 0,68961204
Uji Heteroskedastisitas	• Prob. X1 0,1404 • Prob. X2 0,3380 • Prob. X3 0,9973
Uji Normalitas	• Jarque-Bera 3,142239 • Prob. 0,207812

Sumber: Eviews 12 SV, data diolah, Tahun 2025

Berdasarkan hasil uji Chow model terbaik ialah FEM, hasil dari uji Hausman juga model terbaik ialah FEM. Dikarenakan hasil keputusan yaitu Fixed Effect Model maka tidak diperlukan dalam pengambilan keputusan uji Lagrange Multiplier.

Hasil uji multikolinearitas menyatakan bahwa ketiga variabel memiliki nilai korelasi < 0,80 maka tidak terjadi multikolinearitas sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh (Ghozali & Ratmono, 2017) Apabila nilai korelasi antara dua variabel independen melebihi 0,80, hal tersebut mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai korelasi berada di bawah 0,80, maka dapat

disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas jika nilai korelasi berada di bawah 0,80.

Hasil uji heteroskedastisitas mendapatkan bahwa Prob. ketiga variabel > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Basuki, 2021) yaitu jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model terindikasi mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas melebihi 0,05, berarti model tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil dari prob. Jarque-Bera sebesar 0,207812 maka data terdistribusi normal. Sesuai dengan pernyataan (Basuki, 2021) jika nilai probabilitas > 0,05, residual dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, nilai probabilitas < 0,05, maka residual dianggap tidak berdistribusi normal.

### Hasil Fixed Effect Model

**Tabel 3. Hasil regresi fixed effect model**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
Incercept ( <i>Constant</i> )	81662,08	0,629954	0,5310
X1	3961,434	1,838582	0,0708
X2	0,087023	5,263231	0,0000
X3	-24951,3	-1,51426	0,1350
<i>Fixed Effects (Cross)</i>			
JATIM--C			34680,29
JATENG--C			32816,87
JABAR--C			37943,85
NTB--C			-27810,67
LAMPUNG--C			-46431,90
BALI--C			-31198,43
<i>R-squared</i>			0,894471
<i>F-statistic</i>		25,02471	0,000000

Sumber: Eviews 12 data diolah, Tahun 2025

Dari hasil olah data tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 81662,08 + 3961,434 X1 + 0,087023 X2 - 24951,33 X3 \quad (2)$$

Mengacu pada Tabel 2, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,894471 menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, dan rata-rata lama sekolah, mampu menjelaskan variasi variabel dependen berupa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar 89,45%. Adapun sisanya, yakni 10,55%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar cakupan penelitian ini, seperti kebijakan migrasi, jaringan sosial migran, perbedaan bahasa dan budaya, serta determinan eksternal lainnya.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai probabilitas (F-statistik) sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa secara bersamaan, ketiga variabel independen tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah pekerja migran Indonesia di enam provinsi pada periode 2010–2023.

Berdasarkan hasil uji-t, tingkat pengangguran terbuka memperoleh nilai probabilitas  $0,0708 > 0,05$ , maka tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pekerja migran Indonesia di enam provinsi pada periode 2010–2023.

Hasil uji-t upah minimum provinsi memiliki nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pekerja migran Indonesia di enam provinsi selama periode 2010–2023.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah mencatat nilai probabilitas sebesar  $0,1350 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pekerja migran Indonesia di enam provinsi dalam kurun waktu 2010–2023.

Berdasarkan Tabel 2. terdapat persamaan pengaruh parsial pada 6 provinsi di Indonesia tahun 2010-2023 sebagai berikut.

$$\text{Jawa Timur} = 116342.37 + 3961,43 X_1 + 0,0870 X_2 - 24951,33 X_3 \quad (3)$$

$$\text{Jawa Tengah} = 114478.95 + 3961,43 X_1 + 0,0870 X_2 - 24951,33 X_3 \quad (4)$$

$$\text{Jawa Barat} = 119605.93 + 3961,434 X_1 + 0,0870 X_2 - 24951,33 X_3 \quad (5)$$

$$\text{Nusa Tenggara Barat} = 53851.41 + 3961,43 X_1 + 0,0870 X_2 - 24951,33 X_3 \quad (6)$$

$$\text{Lampung} = 35230.18 + 3961,434 X_1 + 0,087023 X_2 - 24951,33 X_3 \quad (7)$$

$$\text{Bali} = 81662.09 + 3961,434 X_1 + 0,087023 X_2 - 24951,33 X_3 \quad (8)$$

Berdasarkan hasil estimasi persamaan (3) hingga (8), dapat diketahui bahwa dengan asumsi variabel tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, dan rata-rata lama sekolah berada pada kondisi konstan, maka efek parsial terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di masing-masing provinsi menunjukkan variasi yang berbeda. Di Provinsi Jawa Timur efek individual tercatat sebesar 116.342,37 orang, di Provinsi Jawa Tengah sebesar 114.478,95 orang, dan di Provinsi Jawa Barat sebesar 119.605,93 orang. Selanjutnya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat efek individual terhadap jumlah PMI sebesar 53.851,41 orang, di Provinsi Lampung sebesar 35.230,18 orang, sedangkan di Provinsi Bali tercatat sebesar 81.662,09 orang. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik antarprovinsi yang memengaruhi jumlah PMI meskipun variabel-variabel utama dalam model berada dalam kondisi konstan. Pengaruh parsial *Fixed Effect Model* pada 6 provinsi tahun 2010-2023 dapat disajikan pada Gambar 1.



**Grafik 2. Pengaruh Individu Fixed Effect Model**

Sumber: Output data sekunder, diolah Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 1, provinsi yang berada di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menunjukkan jumlah PMI lebih tinggi daripada provinsi di luar Jawa yaitu NTB, Bali, dan Lampung. Hal ini diduga disebabkan oleh jumlah penduduk yang lebih besar di Pulau Jawa, sehingga potensi tenaga kerja yang tersedia pun lebih banyak. Selain itu, jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di wilayah Jawa juga cenderung lebih banyak, yang dapat dilihat melalui data tahun 2023, di mana Jawa Timur memiliki 304 P3MI, Jawa Barat 335, Jawa Tengah 320, sedangkan NTB 217, Lampung 283, dan Bali 85. P3MI merupakan perusahaan yang memiliki izin untuk memberikan pelayanan dan penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri. Jumlah P3MI yang lebih besar dapat memberikan akses yang lebih luas bagi calon PMI, terutama dalam proses pelatihan, informasi lowongan kerja, serta legalitas keberangkatan ke negara tujuan.

### **Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah pekerja migran Indonesia**

Temuan dari penelitian ini menyatakan hasil koefisien tingkat pengangguran terbuka nilai 3961,434 dengan probabilitas 0,0708 maka variabel berpengaruh positif terhadap jumlah pekerja migran Indonesia, namun hubungan tersebut tidak signifikan. Ini mengindikasikan bahwa tingginya angka pengangguran tidak serta-merta menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk bermigrasi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori migrasi dari Everett S. Lee, yang menyoroti biaya migrasi sebagai salah satu penghalang terbesar. Biaya yang dimaksud mencakup transportasi, dokumen, dan berbagai persyaratan lainnya yang sering kali terlalu mahal bagi sebagian orang. Dengan demikian, meskipun desakan untuk mencari pekerjaan akibat pengangguran memang ada, besarnya biaya yang harus dikeluarkan justru dapat menghalangi niat seseorang untuk

bekerja di luar negeri. Temuan ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Mangara et al., 2024) dan (Oli, 2023) yang menemukan hasil serupa, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tidak signifikan yang menjelaskan bahwa biaya migrasi dapat menjadi hambatan.

### ***Pengaruh upah minimum provinsi terhadap jumlah pekerja migran Indonesia***

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien 5,263231 dengan probabilitas 0,0000 maka dalam hal ini UMP berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah PMI. Artinya, kenaikan UMP di Indonesia maka diikuti oleh peningkatan jumlah PMI. Hal ini sejalan dengan temuan (Rini et al., 2023) dan (Farraas, 2024) yang mengungkapkan bahwa kenaikan UMP sering diiringi oleh peningkatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kondisi tersebut membuat kenaikan upah tidak selalu berdampak pada peningkatan kesejahteraan, sebab biaya hidup juga ikut mengalami kenaikan. Dalam situasi demikian, bekerja di luar negeri menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar demi mencukupi kebutuhan keluarga. Ketidaksesuaian antara upah di dalam negeri dengan kebutuhan hidup mendorong migrasi sebagai strategi ekonomi rumah tangga.

Fenomena ini sejalan dengan kerangka teori ekonomi, baik pada tataran makro maupun mikro. Menurut teori makroekonomi neoklasik, individu dari negara dengan tingkat upah rendah cenderung bermigrasi ke negara dengan tingkat upah lebih tinggi. Sementara itu, teori mikroekonomi menegaskan bahwa keputusan untuk bermigrasi diambil apabila estimasi keuntungan bersih dari perpindahan bernilai positif, yaitu ketika potensi pendapatan di negara tujuan dengan mempertimbangkan keterampilan dan peluang kerja lebih besar dibandingkan biaya dan risiko migrasi (Achsini & Rosalinda, 2021).

Berdasarkan data Trading Economics dan Exchange Rates per 2 Januari 2023, upah minimum di negara tujuan pekerja migran Indonesia bervariasi. Di Hong Kong, upah minimum ditetapkan sebesar 40 HKD per jam dengan kurs Rp1.992,20 per 1 HKD, sehingga setara dengan Rp79.688 per jam. Selanjutnya, di Taiwan upah minimum sebesar 26.400 TWD per bulan dengan kurs Rp506,34 per 1 TWD, yang berarti setara dengan Rp13.367.407,7 per bulan. Adapun di Malaysia, pekerja menerima upah minimum sebesar 1.500 MYR per bulan dengan kurs Rp3.530,99 per 1 MYR, sehingga totalnya menjadi sekitar Rp5.296.485 per bulan.

Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 di Indonesia, angkanya jauh lebih rendah. UMP di Jawa Timur sebesar Rp2.040.244, di Jawa Tengah Rp1.958.170, dan di Jawa Barat Rp1.986.670. Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebesar Rp2.371.407, di Lampung sebesar Rp2.633.285, dan di Bali sebesar Rp2.713.672. Perbedaan nilai upah yang cukup besar ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dalam negeri dan luar negeri, yang dapat mendorong masyarakat lebih memilih bekerja sebagai pekerja migran.

### ***Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap jumlah pekerja migran Indonesia***

Temuan dari penelitian ini menunjukkan nilai -24951,3 dengan probabilitas 0,1350 maka adanya pengaruh negatif dari rata-rata lama sekolah namun tidak signifikan terhadap jumlah PMI. Artinya, peningkatan rata-rata pendidikan penduduk maka akan mengalami penurunan jumlah PMI, tetapi hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan bukan merupakan faktor dominan yang menentukan keputusan seseorang untuk bekerja di luar negeri.

Secara teori, hasil ini bertolak belakang dengan pandangan Todaro dalam dalam (Husnah, 2019) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki hubungan positif dengan migrasi. Menurut Todaro, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan dengan upah lebih tinggi di sektor modern, sehingga dapat mendorong migrasi. Dalam konteks Indonesia, hubungan negatif ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya rata-rata lama sekolah, sehingga pekerja migran justru lebih banyak berasal dari kelompok dengan pendidikan rendah akibat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Menurut (Rahman et al., 2023) bahwa pendidikan bukanlah faktor utama yang memengaruhi keputusan migrasi. Sebaliknya, kondisi ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih baik menjadi pertimbangan utama. Hal ini sejalan dengan teori migrasi Lee yang menjelaskan bahwa keputusan migrasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu kondisi di daerah asal, kondisi di daerah tujuan, hambatan yang dihadapi, dan faktor-faktor personal. Faktor personal inilah yang dapat mempercepat atau menunda keputusan individu untuk bermigrasi.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya tingkat pengangguran tidak secara langsung mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi internasional, mengingat masih terdapat hambatan lain seperti tingginya biaya keberangkatan. Selanjutnya, upah minimum provinsi memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang berarti bahwa peningkatan upah minimum justru diikuti oleh meningkatnya jumlah PMI, kemungkinan karena kenaikan tersebut tidak selalu sejalan dengan peningkatan biaya hidup. Sementara itu, rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sehingga pendidikan belum menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan migrasi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah PMI, yang menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi fenomena migrasi tenaga kerja.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan kebijakan ketenagakerjaan melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja guna menekan angka pengangguran, serta memastikan bahwa kebijakan kenaikan

upah minimum diimbangi dengan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, peningkatan akses pendidikan hingga minimal pada jenjang menengah atas perlu terus didorong untuk memperluas peluang tenaga kerja di sektor formal. Bagi calon PMI, penyediaan pelatihan kerja dan pemahaman mengenai aspek hukum ketenagakerjaan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas serta perlindungan kerja di luar negeri. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penambahan variabel lain, seperti kebijakan migrasi, jaringan sosial, perbedaan bahasa, dan faktor budaya, agar analisis mengenai determinan keputusan migrasi internasional menjadi lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (1) Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-teori-Migrasi Internasional* (p. 182). Malang: UB Press.
- (2) Aswindo, M., Hanita, M., & SIMON, A. J. (2021). Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.372>
- (3) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Statistik Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, 2013-2023. BP2MI. <https://www.bp2mi.go.id/dashboard-publik>
- (4) Badan Pusat Statistik. [Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2013-2023. BPS-Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/-metode-baru--rata-rata-lamasekolah.html>
- (5) Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2013-2023. BPS-Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/unemployment-rate-by-province.html>
- (6) Badan Pusat Statistik Indonesia. Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah), 2013-2017. BPS-Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwIzI%3D/upah-minimum-regional-propinsi.html>
- (7) Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: *PT Rajagrafindo Persada*, 1–161.
- (8) Farraas, A. (2024). *PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI PULAU JAWA TAHUN 2011-2021*. Skripsi. Jakarta: FEB UIN Jakarta
- (9) Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan eview 10* (II). Universitas Diponegoro.
- (10) Husnah, A. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI SEUMUR HIDUP DI INDONESIA. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1(2), 331–340. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6175>
- (11) Hutasoit, I. (2017). *Masalah Kependudukan di Indonesia*. Jatinangor:IPDN

- (12) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia, 2018-2023. Kemnaker-RI. <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data>
- (13) Kemnaker. (2025). *Perluasan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri bagi Pekerja Migran Indonesia*. <https://majalahsenta.kemnaker.go.id/artikel/perluasan-kesempatan-kerja-ke-luar-negeri-bagi-pekerja-migran-indonesia>
- (14) Mangara, T. H., Saputri, W., & Putri, R. A. (2024). Pengaruh Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Ketenagakerjaan terhadap Migrasi Luar Negeri di Indonesia. *Benefits: Journal of Economics and Tourism*, 1(1), 16–32. <https://doi.org/10.69836/benefits-jeti.v1i1.9>
- (15) Nisa, Khairun. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT MIGRASI TENAGA KERJA (TKI) (Studi Kasus Pada 6 Provinsi Tahun 2008-2017). Skripsi. Jakarta: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYTULLAH
- (16) Prativi, C. (2019). Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018. *Journal of International Relations*, 5, 592–598. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v5i4.24822>
- (17) Rahman, A., Dewi, A. K., Aisyah, S., & Nurbayani, N. (2023). Karakteristik Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Migrasi di Kabupaten Jeneponto. *E-Journal Al-Buhuts*, 19(1), 401–413. <https://doi.org/10.30603/ab.v19i1.3582>
- (18) Reni, Tarmizi, N., & Maryadi. (2016). Analisis Keputusan Bermigrasi Tenaga Kerja Asal Kabupaten Ogan Ilir Ke Malaysia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(2), 74–85. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/1025>
- (19) Rini, A. S., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2023). *Analisis Pengaruh Kepadatan Penduduk, Upah Minimum Provinsi, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Migrasi Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus pada Lima Provinsi di Indonesia Tahun 2011–2022*. <https://id.scribd.com/document/696079691/Analisis-Kepadatan-Penduduk-UMP-RLS-Dan-TPT-Terhadap-Tingkat-Migrasi-TKI-Ke-Luar-Negeri-2011-2022>

Sumber Online:

- (20) Exchange-Rates.org. (2023). Riwayat nilai tukar Dolar Hong Kong ke Rupiah Indonesia tahun 2023. <https://www.exchange-rates.org/id/riwayat-nilai-tukar/hkd-idr-2023>
- (21) Exchange-Rates.org. (2023). Riwayat nilai tukar Ringgit Malaysia ke Rupiah Indonesia tahun 2023. <https://www.exchange-rates.org/id/riwayat-nilai-tukar/myr-idr-2023>
- (22) Exchange-Rates.org. (2023). Riwayat nilai tukar Dolar Taiwan ke Rupiah Indonesia tahun 2023. <https://www.exchange-rates.org/id/riwayat-nilai-tukar/twd-idr-2023>

tukar/twd-idr-2023

- (23) Trading Economics. (2023). Upah minimum Hong Kong. <https://id.tradingeconomics.com/hong-kong/minimum-wages>
- (24) Trading Economics. (2023). Upah minimum Malaysia. <https://id.tradingeconomics.com/malaysia/minimum-wages>
- (25) Trading Economics. (2023). Upah minimum Taiwan. <https://id.tradingeconomics.com/taiwan/minimum-wages>
- (26) Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>